



Fragmentasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Stunting di Indonesia

Agustina Nathasya Yulita Wea¹, Eufrasia Clarissa Perada Botung², Yohanes Agung Kurniawan Hoka³

^{1, 2, 3}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana

Email :

¹tasyawea27@gmail.com

²eufraziapclarissa@gmail.com

³yohanesagungkurniawanhoka@gmail.com

Abstract

This study examines how stunting policy implementation and evaluation in Indonesia are fragmented, using a Systematic Literature Review (SLR) of 15 journal articles from 2022 to 2026. The research highlights three main issues: (1) uneven policy implementation between regions due to differences in institutional capacity and resource allocation, (2) weak coordination between sectors, which leads to programs running separately and not being integrated, and (3) policy evaluations that mostly focus on outputs, making it hard to measure long-term impacts. These findings show that fragmentation is not just a technical problem but points to a broader failure in governance. This study offers an integrated framework for both policy implementation and evaluation. Therefore, improving coordination between sectors, building stronger local institutions, and creating integrated, data-based evaluation systems are crucial to making policies more effective and supporting ongoing efforts to reduce stunting.

Keywords : *Fragmentation Policy Implementation, Policy Evaluation, Stunting, SLR*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fragmentasi implementasi dan evaluasi kebijakan stunting di Indonesia menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 15 artikel jurnal periode 2022-2026. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga pola utama: (1) ketimpangan implementasi kebijakan antardaerah akibat perbedaan kapasitas kelembagaan dan distribusi sumber daya, (2) lemahnya koordinasi lintas sektor yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan sektoral dan tidak terintegrasi, dan (3) dominasi evaluasi kebijakan yang berfokus pada *output* sehingga membatasi pengukuran dampak jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa fragmentasi kebijakan bukan sekadar permasalahan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan sistem tata kelola. Penelitian ini berkontribusi melalui integrasi analisis implementasi dan evaluasi kebijakan dalam satu kerangka utuh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan

daerah, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis data terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan keberlanjutan penurunan stunting.

Kata Kunci : Fragmentasi, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Stunting, SLR.

1. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan pembangunan manusia dengan dampak jangka panjang. Hal ini akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan (Maulana et al., 2022). Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan fisik, kemampuan kognitif, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan (Hidayat & Rahman, 2022). Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional menunjukkan tren penurunan bertahap dalam tiga tahun terakhir, dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022, 21,5% pada 2023, dan 19,8% pada 2024 (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan [BPKP], 2025a; Tim Percepatan Penurunan Stunting [TP2S], 2025a, 2025b; Kemenko PMK, 2025).

Meskipun pencapaian ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 sebesar 20,1% dan mencegah sekitar 377.000 kasus baru, angka 19,8% masih tinggi secara absolut karena memengaruhi 4,4 juta balita serta terkonsentrasi pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin (29,8%) dan provinsi tertentu seperti NTT (37%) (BKPK, 2025b; TP2S, 2025b; Kemenko PMK, 2025). Analisis faktor risiko dari data SSGI 2024 mengonfirmasi kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil sebagai prediktor dominan (AOR=1,63; 95% CI:1,54-1,74), diikuti disparitas wilayah pedesaan (AOR=1,30) dan kurangnya diskusi isi Buku KIA (AOR=1,23) (Ilmu Bersama Center, 2025). Penurunan ini belum mencapai target ambisius akhir 2024 (14%) maupun proyeksi RPJMN 2029 (14,2%), sehingga diperlukan akselerasi intervensi berkelanjutan mengingat disparitas antarprovinsi, puncak prevalensi pada usia balita 2-2,5 tahun (24,2%), serta faktor risiko maternal seperti usia ibu berisiko (AOR=1,14) yang masih signifikan (BKPK, 2025a; TP2S, 2025a; Ilmu Bersama Center, 2025).

Pemerintah Indonesia menetapkan penanganan stunting sebagai program prioritas nasional melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi gizi spesifik dan sensitif (Saputra et al., 2022). Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas permasalahan stunting yang melibatkan aspek di luar kesehatan seperti pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial (Maulana et al., 2022). Program penurunan stunting melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) melibatkan multi-sektor, tetapi sering terhambat oleh fragmentasi akibat ego sektoral, di mana instansi seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial menjalankan program sensitif stunting secara terpisah tanpa koordinasi sinkron (Larasati & Rahmadanik, 2023; CISDI, 2024). Contoh nyata terlihat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, di mana Disdikbud, DPUPRPKP, DPMD, dan Dinsos gagal berkolaborasi efektif karena absennya regulasi pemantauan, yang menyebabkan program berjalan normatif dan kontribusi 70% terhadap target stunting tidak tercapai (Larasati & Rahmadanik, 2023). Fenomena serupa terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Rote, di mana lintas sektor gagal mencapai konvergensi meskipun 22 rapat koordinasi digelar, sehingga prevalensi stunting tetap tinggi 37,9% pada SSGI 2024 akibat program Dinkes, Disdik, dan Kemendesa berjalan terpisah tanpa integrasi data (ResearchHub, 2025; Pemerintah Provinsi NTT, 2024).

Meskipun kebijakan telah dirancang secara komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan kesenjangan signifikan antardaerah (Pratama et al., 2023). Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta lemahnya koordinasi lintas sektor yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak optimal dan cenderung tumpang tindih (Saputra et al., 2022). Kondisi ini menciptakan fragmentasi kebijakan, di mana kebijakan nasional terpecah saat diterjemahkan di tingkat daerah karena distribusi kekuasaan *top-down* yang kuat, ego sektoral antarperangkat daerah, serta absennya regulasi pemantauan lintas sektor yang menyebabkan program sensitif stunting berjalan terpisah tanpa integrasi data (Larasati & Rahmadanik, 2023; ResearchHub, 2025). Sejumlah studi juga mengungkap keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal sebagai hambatan utama pelaksanaan kebijakan, sementara kualitas jaringan tata kelola berperan penting dalam keberhasilan implementasi di daerah (Selo & Payong, 2026; Rembu et al., 2025).

Selain implementasi, evaluasi kebijakan juga menghadapi kendala. Evaluasi cenderung fokus pada *output* dan belum mampu mengukur dampak jangka panjang secara menyeluruh (Dunn, 2018; Susanti et al., 2023). Keterbatasan sistem monitoring dan belum terintegrasinya data antarsektor menyebabkan evaluasi belum sepenuhnya berbasis bukti. Akibatnya, evaluasi sering gagal menangkap kegagalan sistemik selama implementasi, seperti fragmentasi program lintas sektor dan disparitas regional yang berkontribusi pada kegagalan target stunting nasional (Larasati & Rahmadanik, 2023; Fanani et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi perlu diperkuat agar mampu memberikan gambaran lebih komprehensif terkait efektivitas kebijakan (Lubis et al., 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama kebijakan penanggulangan stunting tidak hanya pada perencanaan atau desain, tetapi lebih pada implementasi dan lemahnya sistem evaluasi (Edwards III, 1980; Grindle, 1980). Hal ini mencerminkan kesenjangan antara perencanaan kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah.

Adapun keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis implementasi dan evaluasi kebijakan stunting dalam suatu kerangka yang utuh melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola kegagalan holistik yang lebih komprehensif dibandingkan dengan studi sektoral konvensional (Saetren, 2014). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan kedua aspek tersebut, penelitian ini memandang implementasi dan evaluasi sebagai satu sistem yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.

Penelitian ini menekankan bahwa fragmentasi kebijakan merupakan indikasi dari kegagalan dalam sistem tata kelola secara menyeluruh (*systematic governance failure*), bukan sekadar persoalan teknis di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi dan evaluasi kebijakan stunting di Indonesia dengan menggunakan pendekatan SLR guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi empiris bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem evaluasi yang lebih holistik dan berbasis bukti ilmiah, sehingga mampu menjembatani kesenjangan regional serta mengurangi fragmentasi sektoral yang menghambat pencapaian target stunting nasional demi kesejahteraan generasi anak Indonesia.

Tinjauan Pustaka

a. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan karena menentukan sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Menurut Edwards

III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Komunikasi sendiri menjadi elemen yang krusial karena berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada para pelaksana. Komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antaraktor pelaksana sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Dalam konteks kebijakan stunting, komunikasi yang tidak efektif sering kali menyebabkan lemahnya koordinasi antarsektor kesehatan dan nonkesehatan. Sumber daya meliputi ketersediaan tenaga kerja, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Banyak daerah yang sudah memiliki kebijakan yang secara normatif sudah baik, namun belum dapat diimplementasikan secara maksimal akibat keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki.

Disposisi atau sikap pelaksana juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Komitmen, integritas, dan motivasi para pelaksana sangat memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Pelaksana dengan tingkat komitmen yang tinggi cenderung lebih mampu menghadapi berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi. Struktur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi organisasi serta tumpang tindih kewenangan antarlembaga dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. Dalam kebijakan stunting, keterlibatan banyak sektor tanpa koordinasi yang jelas dapat menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh konteks politik dan administratif, termasuk kepentingan para aktor, kapasitas institusi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kebijakan dijalankan.

b. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta dampak dari sebuah kebijakan. Menurut Dunn (2018), evaluasi berperan sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Secara umum, evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu evaluasi proses, evaluasi *output*, dan evaluasi *outcome*. Evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan kebijakan; evaluasi *output* menilai hasil langsung yang dihasilkan; sedangkan evaluasi *outcome* mengukur dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Namun, dalam praktiknya, di Indonesia, evaluasi masih lebih banyak berfokus pada *output*, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas kebijakan. Keterbatasan data serta lemahnya sistem monitoring menjadi hambatan utama dalam evaluasi kebijakan. Data yang tidak terintegrasi menyulitkan proses analisis yang akurat dan komprehensif. Selain itu, evaluasi yang bersifat administratif cenderung hanya menitikberatkan pada pelaporan kegiatan tanpa mengukur dampak nyata yang dihasilkan (Dunn, 2018).

c. Pendekatan Multisektoral dalam Kebijakan Stunting

Penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral karena permasalahannya tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Maulana et al., 2022). Oleh karena itu, intervensi gizi spesifik dari sektor kesehatan perlu didukung oleh intervensi gizi sensitif lain dari sektor pendidikan, sanitasi, dan perlindungan

sosial. Pendekatan multisektoral menuntut adanya koordinasi dan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat (Rembu et al., 2025). Tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan cenderung berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi sehingga mengurangi efektivitas dalam menurunkan angka stunting secara signifikan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan stunting sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai sektor serta menciptakan sinergi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

2. Metodologi

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan desain kualitatif deskriptif-analitis untuk menelaah implementasi dan evaluasi kebijakan stunting di Indonesia. SLR dipilih karena menyediakan sintesis yang terstruktur, transparan, dan berbasis bukti dari penelitian sebelumnya. Dalam studi kebijakan publik, metode ini membantu peneliti mengintegrasikan hasil penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika implementasi kebijakan di berbagai wilayah. Penelitian ini tidak menggunakan data primer atau pengumpulan data lapangan, melainkan sepenuhnya berbasis analisis literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan SLR digunakan untuk menghasilkan sintesis temuan penelitian yang komprehensif dan berbasis bukti. Pendekatan SLR juga digunakan untuk mengidentifikasi pola umum, mendeteksi ketidakkonsistenan hasil penelitian, dan mengungkap kesenjangan riset dalam kebijakan stunting di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di berbagai daerah.

b. Sumber Data dan Kriteria Literatur

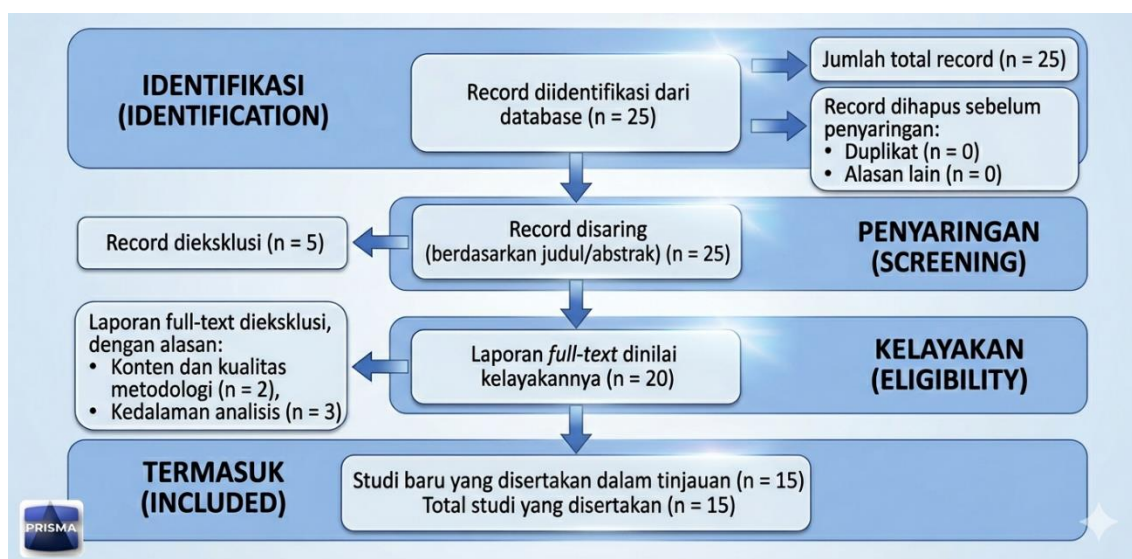
Sumber data dalam penelitian ini dihimpun melalui artikel jurnal ilmiah nasional yang memiliki relevansi tematik dengan implementasi dan evaluasi kebijakan stunting. Artikel yang digunakan dibatasi pada rentang tahun publikasi 2022-2026 agar literatur yang digunakan mencerminkan kondisi kebijakan terkini. Penelusuran literatur dilakukan melalui pangkalan data bereputasi yang meliputi *Google Scholar*, Garuda (Garba Rujukan Digital), serta jurnal nasional yang telah terakreditasi. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci spesifik, yaitu “implementasi kebijakan stunting”, “evaluasi kebijakan stunting”, dan “public policy implementation stunting Indonesia”. Kata kunci tersebut dikombinasikan dengan menggunakan teknik Boolean (*AND*, *OR*) untuk mengoptimalkan jangkauan hasil penelusuran. Adapun kriteria inklusif yang diterapkan meliputi:

- 1) Artikel yang mengkaji secara eksplisit mengenai implementasi atau evaluasi kebijakan stunting,
- 2) Studi yang dilakukan dalam konteks Indonesia,
- 3) Artikel berbasis riset empiris dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dan
- 4) Dokumen tersedia dalam format teks lengkap (*full text*).

Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan stunting, naskah opini atau naskah konseptual tanpa data empiris, serta publikasi yang tidak melalui peer-review. Setelah seleksi, 15 artikel ilmiah memenuhi kriteria sebagai instrumen analisis utama.

c. Proses Seleksi Literatur (PRISMA)

Prosedur seleksi literatur mengikuti kerangka *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tahap awal dimulai dengan identifikasi 25 artikel relevan berdasarkan kata kunci yang digunakan. Tahap berikutnya adalah *screening* untuk mengeliminasi naskah duplikat dan yang tidak sesuai dengan fokus penelitian, sehingga tersisa 20 artikel. Proses dilanjutkan ke fase *eligibility*, yaitu penilaian kelayakan artikel berdasarkan isi, kualitas metodologi, dan kontribusi terhadap topik penelitian, sehingga tersisa 18 artikel. Pada tahap final (*included*), seleksi akhir mempertimbangkan kedalaman analisis dan relevansi temuan, sehingga diperoleh 15 artikel yang digunakan dalam penelitian ini. Keseluruhan proses ini dapat dibambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram PRISMA

Seluruh rangkaian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis memiliki validitas dan relevansi yang tinggi.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan sintesis tematik (*thematic synthesis*) berdasarkan kerangka Tranfield et al. (2003). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam satu kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif.

Analisis dimulai dengan ekstraksi data dari setiap artikel, meliputi lokasi penelitian, fokus kajian, metode, dan temuan utama. Selanjutnya, dilakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema utama seperti implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, faktor penghambat, dan faktor pendukung. Tema yang teridentifikasi diklasifikasikan dan dianalisis secara komparatif untuk menemukan pola umum dan perbedaan antarpelelitian. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil analisis akurat.

Analisis juga dilakukan secara kritis dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang relevan. Langkah ini bertujuan menghasilkan interpretasi yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan stunting di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi substantif untuk memahami kompleksitas kebijakan stunting dan menjadi dasar perumusan strategi kebijakan yang lebih progresif.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Sintesis Literatur Kebijakan Stunting

Berdasarkan hasil kajian terhadap lima belas artikel ilmiah yang telah dipilih melalui pendekatan SLR, ditemukan bahwa fragmentasi kebijakan stunting di Indonesia membentuk tiga pola dominan. Pertama, implementasi kebijakan tidak merata antardaerah akibat perbedaan kapasitas kelembagaan dan distribusi sumber daya. Kedua, koordinasi lintas sektor masih lemah sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Ketiga, evaluasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan berbasis *output* yang belum mampu mengukur dampak jangka panjang secara komprehensif (Saputra et al., 2022; Pratama et al., 2023). Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi geografis, melainkan juga oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, hingga kesiapan sumber daya di masing-masing daerah dalam mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif dan efisien (Selo & Payong, 2026; Rembu et al., 2025; Maulana et al., 2022).

Fenomena ini sesuai dengan pandangan dari Edwards III (1980) yang menegaskan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan struktur birokrasi yang mapan. Selain itu, temuan ini juga memperkuat argumen dari Grindle (1980) mengenai krusialnya peran kapasitas institusi serta dinamika konteks politik dalam implementasi kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan penanganan stunting di Indonesia telah dirancang melalui pendekatan integratif yang memadukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Pendekatan ini merefleksikan pemahaman pemerintah bahwa stunting merupakan sebuah permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan isu kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Namun demikian, data menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan desain kebijakan yang telah ditetapkan di level nasional. Untuk memberikan pandangan yang lebih sistematis, disajikan sintesis dari lima belas jurnal yang dianalisis:

Tabel 1. Sintesis 15 Jurnal Penelitian Stunting

No.	Nama Penulis	Tahun	Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kategori Masalah
1.	Selo & Payong	2026	Kualitatif	Lembata	Implementasi	Kapasitas aparatur rendah	Kapasitas Kelembagaan
2.	Rembu et al.	2025	Kualitatif	TTU	Governance	Kolaborasi lintas sektor penting	Koordinasi
3.	Fanani et al	2025	Kualitatif	Jawa Timur	Evaluasi	Audit belum optimal	Sistem evaluasi
4.	Hidayat & Rahman	2022	Kuantitatif	Sumedang	Implementasi	Implementasi berpengaruh	Implementasi
5.	Kurniawan & Sari	2023	Kualitatif	Bogor	Evaluasi	Monitoring lemah	Sistem evaluasi
6.	Maulana et al	2022	Literatur /SLR	Nasional	Integrasi	Tidak merata	Koordinasi
7.	Susanti et al.	2023	Kualitatif	Manggarai Timur	Puskesmas	<i>Output oriented</i>	Evaluasi
8.	Saepudin et al.	2025	Kualitatif	Sukabumi	Implementasi	Kolaboratif	Koordinasi

No.	Nama Penulis	Tahun	Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kategori Masalah
9.	Pratama et al.	2023	Kualitatif	Samarinda	Implementasi	SDM terbatas	Kapasitas kelembagaan
10.	Andriani & Yusuf	2024	Kuantitatif	Hulu Sungai Utara	Gizi	Dampak kecil	Evaluasi
11.	Rembu et al.	2025	Kualitatif	Malang	Sosial	Koordinasi	Koordinasi
12.	Saputra et al.	2022	Kualitatif	Purbalingga	Implementasi	Anggaran terbatas	Sumber daya
13.	Wulandari & Putra	2024	Kualitatif	Buton	Implementasi	Lemah	Kapasitas kelembagaan
14.	Rahmawati & Utami	2023	Kualitatif	Brebes	Implementasi	Partisipasi rendah	Partisipasi
15.	Maulana et al.	2022	Literatur	Malang	Gizi	Efektif jika integratif	Koordinasi

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian secara konsisten mengidentifikasi tiga isu utama, yaitu ketimpangan implementasi antardaerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta sistem evaluasi yang belum terintegrasi. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan stunting di Indonesia bersifat sistemik dan terjadi secara konsisten di berbagai daerah (Saputra et al., 2022; Pratama et al., 2023).

Di samping itu, ditemukan adanya kecenderungan bahwa daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat serta mekanisme koordinasi yang efektif secara umum mampu menunjukkan performa implementasi kebijakan yang jauh lebih unggul. Sebaliknya, daerah yang masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya mengalami hambatan besar dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam skema program yang operasional. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa efektivitas dan keberhasilan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, melainkan juga sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal.

b. Analisis Implementasi Kebijakan Stunting

Implementasi kebijakan stunting di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila ditinjau melalui perspektif struktural, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas sistem birokrasi yang berperan sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Edwards III, 1980; Grindle, 1980). Di beberapa daerah seperti Kabupaten Lembata, proses implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan fundamental yang dipicu oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa. Aparatur tersebut dinilai belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun perencanaan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diimplementasikan cenderung bersifat administratif dan tidak menyentuh esensi substantif permasalahan (Selo & Payong, 2026). Fenomena ini mengindikasikan bahwa desentralisasi kebijakan belum sepenuhnya disertai dengan upaya penguatan kapasitas lokal yang komprehensif.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan disposisi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan di daerah (Edwards III, 1980). Sebaliknya, di Kota Sukabumi, implementasi kebijakan menunjukkan capaian yang relatif lebih optimal karena adanya kolaborasi lintas sektor yang terkonsolidasi dengan kuat. Pemerintah daerah setempat terbukti mampu membangun sinergi antara berbagai aktor yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan masyarakat, sehingga memunculkan sebuah paradigma pendekatan yang lebih komprehensif (Saepudin et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang berjalan efektif merupakan faktor kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.

Akan tetapi, di daerah seperti Kabupaten Buton dan Brebes, proses implementasi kebijakan masih mengalami hambatan akibat lemahnya pola koordinasi antarinstansi serta minimnya tingkat partisipasi dari masyarakat. Kebijakan yang dioperasionalkan cenderung berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi, sehingga membatasi ruang efektivitas dari kebijakan itu sendiri (Wulandari & Putra, 2024; Rahmawati & Utami, 2023). Di samping itu, adanya ketimpangan distribusi sumber daya juga menjadi faktor penghambat utama dalam proses implementasi kebijakan. Terdapat realitas di mana banyak daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan tenaga kerja profesional yang secara langsung berimplikasi pada rendahnya cakupan program. Ketimpangan distribusi sumber daya antardaerah ini semakin memperkuat kesenjangan dalam efektivitas implementasi kebijakan (Saputra et al., 2022).

Jika ditinjau dari perspektif kontekstual, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya gizi dan kesehatan menjadi salah satu hambatan krusial dalam pelaksanaan program. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan (Maulana et al., 2022).

Lebih jauh lagi, proses implementasi kebijakan juga sering kali terbentur oleh kendala koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat seringkali sulit untuk diadaptasi secara fleksibel di tingkat daerah, sehingga memicu munculnya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa pendekatan *top-down* masih cenderung mendominasi implementasi kebijakan stunting di Indonesia (Grindle, 1980). Rangkaian kondisi tersebut juga sekaligus memperkuat argumen yang diajukan Grindle (1980) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh konteks politik dan kapasitas institusi yang dimiliki oleh otoritas di tingkat lokal.

c. Analisis Evaluasi Kebijakan Stunting

Proses evaluasi kebijakan stunting di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan fundamental, terutama yang berkaitan erat dengan pendekatan evaluasi yang diaplikasikan (Susanti et al., 2023; Lubis et al., 2025). Mayoritas mekanisme evaluasi yang masih berjalan cenderung menitikberatkan pada pencapaian *output*, seperti jumlah program atau kegiatan yang dilaksanakan, tanpa memberikan perhatian yang proporsional terhadap *outcome* atau dampak jangka panjang yang dihasilkan dari kebijakan tersebut (Dunn, 2018; Susanti et al., 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik evaluasi kebijakan yang ada belum mampu memenuhi prinsip-prinsip evaluasi berbasis hasil (*outcome*) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dunn (2018). Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena belum mampu mengukur efektivitas kebijakan secara komprehensif. Terdapat fakta bahwa banyak kebijakan yang menunjukkan peningkatan *output*, namun realitas tersebut tidak diikuti dengan penurunan angka stunting secara signifikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara implementasi program dengan hasil substansial yang berhasil dicapai (Dunn, 2018).

Apabila ditelaah melalui perspektif Edwards III (1980), situasi ini mencerminkan masih lemahnya aspek komunikasi di dalam sistem kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan integrasi serta sinkronisasi data lintas instansi. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang tersedia saat ini dinilai belum terintegrasi secara nasional. Data yang diproduksi oleh berbagai institusi sering kali menunjukkan ketidaksinkronan, sehingga menghambat proses analisis yang mendalam dan menyulitkan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data (Kurniawati & Sari, 2023; Lubis et al., 2025). Keterbatasan ini menegaskan bahwa sistem evaluasi kebijakan belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pendukung dalam proses pembelajaran kebijakan.

Dalam beberapa studi kasus, munculnya inovasi seperti audit kasus stunting sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen evaluasi yang lebih komprehensif. Namun demikian, implementasi dari inovasi tersebut masih terbatas dan belum diadopsi sebagai praktik standar yang berlaku umum di seluruh daerah (Fanani et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kemajuan inovasi kebijakan dengan realitas praktik di lapangan. Selain itu, kendala berupa keterbatasan kapasitas teknis dalam menyelenggarakan evaluasi juga menjadi hambatan yang krusial. Banyak daerah yang belum memiliki sistem evaluasi berbasis data yang memadai, sehingga proses evaluasi yang dilakukan cenderung hanya bersifat administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan di Indonesia masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan yang lebih intensif di masa mendatang (Firmansyah & Lestari, 2025).

d. Perbandingan Implementasi Antar Daerah

Perbandingan implementasi kebijakan antardaerah menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan, baik dari aspek efektivitas implementasi maupun kualitas evaluasi kebijakan yang dijalankan. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sumber daya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh standar kualitas tata kelola institusional dan koordinasi yang terjalin di antara aktor-aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Implementasi Kebijakan

Daerah	Implementasi	Evaluasi	Masalah Utama
Lembata	Lemah	Lemah	SDM
TTU	Baik	Sedang	Koordinasi
Sukabumi	Baik	Baik	Skalabilitas
Bogor	Sedang	Lemah	Data
Buton	Lemah	Lemah	Koordinasi

Sumber: Hasil sintesis peneliti (2026)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, terlihat bahwa daerah-daerah yang didukung oleh kapasitas kelembagaan yang baik dan mekanisme koordinasi yang kuat cenderung memiliki implementasi yang jauh lebih efektif. Sebaliknya, daerah-daerah dengan keterbatasan kapasitas institusional serta rendahnya sinergi koordinasi menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengoperasionalkan kebijakan secara optimal (Edwards III, 1980; Grindle, 1980).

Fenomena ini memberikan indikasi kuat bahwa variabel sumber daya dan struktur birokrasi, sebagaimana yang dirumuskan dalam kerangka model Edwards III (1980), belum mampu terakomodasi secara merata di seluruh daerah. Realitas tersebut sekaligus mempertegas bahwa agenda desentralisasi kebijakan sejauh ini belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan efektivitas kebijakan di seluruh daerah. Tanpa adanya dukungan penguatan kapasitas lokal yang

memadai, desentralisasi justru berpotensi memperluas kesenjangan antarwilayah (Edwards III, 1980; Grindle, 1980).

e. Analisis Kritis Terintegrasi

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat ditegaskan bahwa problematika fundamental dalam kebijakan stunting di Indonesia sebenarnya tidak berakar pada desain kebijakan, melainkan lebih disebabkan oleh adanya fragmentasi pada level implementasi serta lemahnya sistem evaluasi yang dijalankan. Dalam kerangka Edwards III (1980), fragmentasi ini menunjukkan kegagalan dalam mengintegrasikan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Fragmentasi implementasi ini terjadi akibat kebijakan dioperasionalkan secara sektoral tanpa adanya integrasi yang kuat di antara para aktor pelaksana. Setiap sektor cenderung bergerak secara parsial dan mandiri tanpa didukung oleh mekanisme koordinasi yang efisien, sehingga menghambat terciptanya sinergi kebijakan yang utuh (Edwards III, 1980). Selain itu, desentralisasi kebijakan yang tidak disertai dengan peningkatan kapasitas daerah semakin memperburuk kondisi permasalahan ini di lapangan. Sementara itu, jika ditinjau melalui perspektif Grindle (1980), realitas ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas institusional dan pengaruh dari konteks politik lokal yang bervariasi antardaerah.

Di sisi lain, mekanisme evaluasi kebijakan yang belum bertumpu pada basis data yang akurat menyebabkan kebijakan menjadi sulit untuk diukur efektivitasnya. Ketiadaan sistem data yang terintegrasi secara menyeluruh menjadi hambatan besar dalam proses pengambilan keputusan strategis serta upaya perbaikan kebijakan yang berkelanjutan (Dunn, 2018; Lubis et al., 2025). Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keberhasilan kebijakan stunting sangat bergantung pada integrasi yang erat antara tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan. Tanpa adanya sinergi integratif tersebut, kebijakan yang telah dirancang secara komprehensif tidak akan mampu mencapai target sasaran yang diharapkan secara optimal (Grindle, 1980).

Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat argumentasi Edwards III (1980) bahwa kegagalan pada implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks kebijakan stunting di Indonesia, kelemahan pada aspek koordinasi lintas sektoral menunjukkan adanya hambatan komunikasi dan struktur birokrasi yang masih terfragmentasi secara nyata. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kapasitas daerah memperkuat tesis bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas desain tingkat pusat, melainkan juga sangat ditentukan oleh kesiapan institusional di tingkat lokal. Selanjutnya, perspektif dari Grindle (1980) turut menegaskan bahwa konteks politik dan administratif memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kebijakan, yang dalam penelitian ini tercermin dari adanya variasi capaian implementasi antardaerah sebagai dampak dari perbedaan kapasitas serta kondisi sosial ekonomi lokal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap lima belas artikel, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama kebijakan stunting di Indonesia terletak pada fragmentasi implementasi dan lemahnya sistem evaluasi kebijakan. Fragmentasi tersebut mencerminkan adanya kegagalan dalam tata kelola kebijakan yang menghambat keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah. Temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain yang komprehensif, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah serta kualitas koordinasi lintas sektor dalam proses implementasi. Di sisi lain, dominasi pendekatan evaluasi yang berorientasi pada *output* menyebabkan kebijakan belum mampu diukur dampak jangka panjangnya secara optimal. Oleh

karena itu, diperlukan pergeseran pendekatan kebijakan yang lebih integratif dengan menekankan pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis data yang terintegrasi. Dengan demikian, keberhasilan penurunan stunting ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan secara sistemik, adaptif, dan berbasis bukti.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Andriani, P., & Yusuf, M. (2024). Implementasi program gizi dalam penurunan stunting di Manggarai Timur. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 6(2), 89–101. <https://doi.org/10.25311/keskom.v6i2.88901>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2025a). *Capaian SSGI 2024 ungkap tren positif*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/capaian-ssgi-2024-ungkap-tren-positif/>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2025b). *Potret stunting di Indonesia*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-stunting-di-indonesia/>
- Cahaya Mandalika. (2025). Analisis kebijakan stunting menggunakan pendekatan literature review (SLR) yang sistematis. *Jurnal Cahaya Mandalika*. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2067>
- Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2024, Oktober 24). *Anggaran jumbo program kesehatan Prabowo-Gibran, CISDI mendorong perbaikan tata kelola*. <https://cisdi.org/siaran-pers/anggaran-jumbo-program-kesehatan>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis (6th ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fanani, Z., Prasetyo, B., & Wibowo, A. (2025). Audit kasus stunting sebagai instrumen evaluasi kebijakan kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 11(2), 89–102. <https://doi.org/10.20473/jaki.v11i2.33445>
- Firmansyah, A., & Lestari, R. (2025). Evaluasi kebijakan stunting berbasis integrasi data nasional. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(2), 140–155. <https://doi.org/10.22212/jks.v12i2.99012>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400853977>
- Hidayat, M., & Rahman, F. (2022). Efektivitas kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 201–215. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.44556>

- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Ilmu Bersama Center. (2025). Dinamika faktor risiko maternal dan disparitas wilayah terhadap kejadian stunting: analisis data berbasis bukti SSGI 2024. *Journal Ilmu Bersama Center*. <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/PubHealth/article/download/1518/720/8164>
- Kemenkopmk. (2025, Mei 1). *Prevalensi stunting tahun 2024 turun menjadi 19,8 persen. Pemerintah terus mendorong penguatan gizi*. <https://www.kemenkopmk.go.id/prevalensi-stunting-tahun-2024-turun-jadi-198-persen-pemerintah-terus-dorong-penguatan-gizi>
- Kurniawati, L., & Sari, M. (2023). Monitoring dan evaluasi kebijakan stunting di Kabupaten Bogor. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 77–90. <https://doi.org/10.20473/jap.v14i1.55678>
- Larasati, N., & Rahmadanik, D. (2023). Koordinasi stakeholder dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. *Widya Publika*, 11(2), 102–112. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/download/1107/947>
- Lubis, H., Siregar, F., & Nasution, R. (2025). Evaluasi kebijakan stunting berbasis sistem monitoring nasional. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 201–215. <https://doi.org/10.15294/kemas.v17i3.45678>
- Maulana, R., Sari, D., & Putri, A. (2022). Integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting. *Jurnal Gizi Indonesia*, 10(2), 100–112. <https://doi.org/10.14710/jgi.10.2.100-112>
- Oktapianingsi, R., & Usiono. (2025). Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan: Systematic literature review. *AMI – Jurnal Pendidikan dan Riset*, 3(2), 56–70. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami/article/download/5144/1899>
- Pemerintah Provinsi NTT. (2024, Agustus 21). *Penjabat Gubernur NTT mengajak Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk fokus mencapai target 35,5% pada tahun 2024*. <https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=1249>
- Pratama, Y., Nugraha, A., & Firmansyah, D. (2023). Implementasi kebijakan stunting di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 20(1), 44–58. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.22334>
- Rahmawati, S., & Utami, N. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting di Brebes. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 33–47. <https://doi.org/10.22219/jsp.v8i1.77890>
- Rembu, Y., Kurniawan, B., & Lestari, S. (2025). Governance network dalam implementasi kebijakan stunting di daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 66–80. <https://doi.org/10.33510/jan.v15i1.55667>

- ResearchHub. (2025). Studi literatur: Upaya penanganan keadaan stunting di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Kesejahteraan Indonesia*, 5(2). <https://researchhub.id/index.php/jikki/article/download/6059/3457/18735>
- Saepudin, E., Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kota Sukabumi. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 14(1), 22–35. <https://doi.org/10.22146/jkki.78901>
- Saetren, H. (2014). Implementing the third generation research paradigm in policy implementation research: An empirical assessment. *Public Policy and Administration*, 29(2), 84-105.
- Saputra, A., Nugroho, R., & Widodo, J. (2022). Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145–160. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i2.34567>
- Selo, M., & Payong, M. R. (2026). Kapasitas kelembagaan desa dalam penanganan stunting di Kabupaten Lembata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1), 55–70. <https://doi.org/10.22219/jisp.v10i1.23456>
- Susanti, E., Dewi, R., & Hidayah, N. (2023). Evaluasi program penanganan stunting berbasis puskesmas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 18(2), 150–162. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v18i2.78945>
- Tim Percepatan Penurunan Stunting. (2025a).SSGI 2024: *Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%, mencapai angka di bawah proyeksi Bappenas*. <https://stunting.go.id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-jadi-198-capai-angka-di-bawah-proyeksi-bappenas/>
- Tim Percepatan Penurunan Stunting.(2025b). *Prevalensi stunting Indonesia turun ke 19,8%*. <https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Wulandari, D., & Putra, R. (2024). Implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 120–135. <https://doi.org/10.14710/jip.v9i2.66789>